UPAYA PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DARI ANCAMAN *TRANS ORGANIZED CRIME* BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN

Selvin Hadi Purba, Devina Yuka Utami, Alrin Tambunan

Politeknik Imigrasi, selvinhadipurba1@gmail.com

Abstrak

Era globalisasi saat ini, mobilitas lintas negara semakin mudah dilakukan. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi maraknya kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), salah satunya lewat praktik eksploitasi tenaga kerja WNI di industri judi ilegal di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keimigrasian Indonesia berperan dalam melindungi WNI dari ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk kebijakan, laporan internasional, dan data terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa WNI kerap menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum, pemalsuan dokumen perjalanan, serta terbatasnya edukasi tentang migrasi aman. Sementara itu, tantangan di lapangan bagi petugas imigrasi tidaklah mudah: keterbatasan sumber daya, modus perekrutan yang makin canggih, hingga kurangnya koordinasi antar negara. Namun, berbagai langkah telah dilakukan, seperti memperkuat kerja sama bilateral, memberikan edukasi publik, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif menjadi kunci dalam melindungi WNI dari jeratan TOC yang bersembunyi di balik industri judi Kamboja.

Kata Kunci : Imigrasi, Kejahatan Lintas Batas Terorganisir, Perlindungan Warga Negara Indonesia.

Abstract

In the current era of globalisation, cross-border mobility is increasingly easy to do. Unfortunately, this convenience also opens a gap for the rise of transnational organised crime (TOC), one of which is through the practice of exploiting Indonesian citizens' labour in the illegal gambling industry in Cambodia. This research aims to review how Indonesian immigration plays a role in protecting Indonesian citizens from this threat. Using the literature study method, this research explores various sources of information, including policies, international reports, and current data. The results show that Indonesian citizens are often victimised due to weak law enforcement, falsified travel documents, and limited education on safe migration. Meanwhile, the challenges on the ground for immigration officers are not easy: limited resources, increasingly sophisticated recruitment modes, and lack of coordination between countries. However, various measures have been taken, such as strengthening bilateral cooperation, providing public education, improving regulations, and increasing training for law enforcement officers. This research concludes that a comprehensive and collaborative approach is key to protecting Indonesian citizens from the TOC lurking behind Cambodia's gambling industry.

Keywords : Immigration, Trans Organized Crime, Protection of Indonesian Citizens.

1. Pendahuluan

Pada Pasal 13 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disebutkan "Tiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

negara.”¹ Yang mana menandakan bahwa setiap orang berhak untuk berpindah dan bertempat tinggal dimanapun keinginannya dalam wilayah suatu negara. Hal tersebut menjamin mobilitas setiap individu yang memungkinkan dirinya untuk mencari peluang untuk meningkatkan taraf kehidupannya di suatu wilayah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun hak itu dimiliki oleh setiap orang, hal tersebut tidaklah bersifat absolut. Karena setiap individu harus taat dan patuh terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di negara tujuannya tersebut.

Hal ini berkaitan erat dengan kedaulatan di suatu negara,² karena negara memiliki hak penuh untuk mengatur lalu lintas orang-orang yang masuk dan ke luar wilayah negaranya.³ Peraturan Keimigrasian dibuat dengan tujuan menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta melindungi hak-hak warga negaranya. Di Indonesia, yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas orang yang ke luar atau masuk wilayah Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di era globalisasi yang semakin berkembang pesat ini, mobilitas manusia antar negara mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut didukung karena berkembangnya teknologi serta transportasi yang memudahkan setiap orang untuk melakukan perjalanan lintas negara. Namun, selain memberikan manfaat, perkembangan teknologi dan transportasi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan atau hal yang merugikan lainnya.⁴ Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah kejahatan lintas batas atau *Trans Organized Crime* (TOC) yang melibatkan aktor lintas batas negara dan mempunyai mekanisme yang sistematis.⁵ Kejahatan ini merujuk pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di satu negara, namun konsekuensi hukumnya terjadi di wilayah negara lain.⁶

Jenis TOC menurut PBB dalam *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam hasil survey pada *Fourth United Nations*

¹ www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--SR48R63.pdf, diakses pada hari Minggu (27/04/2025) pukul 08.43 WIB.

² Jazuli A, “Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (*Development of defence and security for law enforcement in Indonesia: a state authority*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016: 194.

³ Nursanto G, “Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Perspektif Konvensi Internasional (*IMOFAL CONVENTION*)”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2019: 1.

⁴ Anishah Wulandari, Devita Maulida Soleha, and Rechal Wulandari, “Analisis Dmpak Globalisasi Pada Perdagangan Internasional”, *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 8, no.1 (April 30, 2023): 1160.

⁵ Heti Friskatati, Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan Terorganisasi Internasional, *Jurnal Kajian Konstitusi* vol. 4 no. 1 tahun 2024: 75.

⁶ Ahmadi Heri Purwono, “Peningkatan Stabilitas Keamanan Maritim ASEAN guna Mencegah Tindak Kejahatan Lintas Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, 2014: 7.

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System, terdapat 18 bentuk kejahatan transnasional, yaitu:

1. Pencucian uang (*money-laundering*);
2. Aktivitas teroris (*terrorist activity*);
3. Pencurian objek seni dan budaya (*theft of art and cultural objects*);
4. Pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property*);
5. Perdagangan gelap senjata (*illicit trafficking in arms*);
6. Pembajakan pesawat terbang (*aircraft hijacking*);
7. Bajak laut (*sea piracy*);
8. Pembajakan lahan (*land hijacking*);
9. Penipuan asuransi (*insurance fraud*);
10. Kejahatan komputer (*computer crime*);
11. Kejahatan lingkungan (*environmental crime*);
12. Perdagangan orang (*trafficking in person*);
13. Perdagangan organ tubuh manusia (*trade in human body parts*);
14. Perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*);
15. Kecurangan (*fraudulent bankruptcy*);
16. Penyusupan pada bisnis legal (*infiltration of legal business*);
17. Korupsi dan penyuapan pejabat publik, pejabat partai, dan wakil rakyat terpilih (*corruption and bribery of public official as defined in national legislation and of party officials and elected representatives as defined in national legislation*);
18. Kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*other offences committed by organized criminal groups*).

Asia Tenggara tengah mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dilihat dari industrialisasi dan kuatnya aktivitas bisnis di kawasan ini. Mulai dari industri manufaktur, pertambangan, perkebunan, pariwisata dan perbankan, beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia mulai menjadi salah satu negara *emerging economy*. Thailand menjadi salah satu pusat pariwisata dunia melalui kebudayaan dan keunikannya.⁷ Salah satu bentuk manifestasi dari kejahatan lintas negara yang semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah praktik eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi ilegal, khususnya yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja. Kamboja telah menjelma menjadi salah satu pusat industri judi daring (*online gambling*) di Asia Tenggara. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan berbasis judi online, sebagian besar berasal dari investor asing, membuka operasional mereka di kota-kota seperti

⁷ Nurul Azizah Zayda, Tindak Pidana Terorganisasi di Asia Tenggara, 2021: 25.

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

Sihanoukville dan Phnom Penh.⁸ Industri ini, meskipun memiliki aspek legal di negara tersebut, berkembang dalam kerangka hukum yang lemah dan penuh celah. Akibatnya, banyak aktivitas ilegal disamarkan dalam bentuk operasional judi online, termasuk penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian uang, hingga pemerasan digital (*cyber extortion*). Yang memprihatinkan, banyak korban berasal dari negara Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja di Kamboja merupakan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan.⁹ Modus perekrutan korban dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penawaran pekerjaan sebagai *customer service*, *data entry*, atau *marketing officer* dengan gaji tinggi di media sosial, hingga penggunaan agen perekrut tidak resmi yang menawarkan jalur cepat bekerja ke luar negeri tanpa persyaratan dokumen yang lengkap.¹⁰ Korban yang mayoritas merupakan kelompok usia produktif yang kerap tergiur oleh janji palsu tersebut tanpa mengetahui bahwa mereka akan dijerumuskan ke dalam sistem eksploitasi di lokasi kerja.¹¹ Fakta menunjukkan bahwa imigrasi memiliki peran sentral dalam mengatur lalu lintas orang, untuk mencegah orang yang akan melakukan tindakan kejahatan bahkan menyeleksi orang yang akan keluar masuk di wilayah Indonesia.¹²

2. Metode

Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode *literature review*,¹³ yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang TOC yang ada di Kamboja yang mengakibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban. Metode Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap isu yang dibahas dengan mengkaji sumber-sumber yang ada. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencakup berbagai perspektif dan temuan terkini. Analisis sumber setelah mengumpulkan data, peneliti akan melakukan analisis terhadap setiap sumber yang telah diidentifikasi. Analisis ini

⁸ <https://www.cna.id/indonesia/kisah-kelam-perdagangan-manusia-di-balik-industri-judi-online-di-kamboja-26426>, diakses pada hari Sabtu (26/04/2025) pukul 09.49 WIB.

⁹ https://nasional.kompas.com/read/2025/04/24/213_92471/angka-wni-bermasalah-di-kamboja-naik-174-persen-1301-kasus-dalam-3-bulan, diakses pada Sabtu (26/04/2025) pukul 10.46 WIB.

¹⁰ <https://planet.merdeka.com/hot-news/1301-wni-terjerat-masalah-di-kamboja-penipuan-daring-melonjak-263-persen-386006-mvk.html?page=3>, diakses pada hari Sabtu (26/04/2025) pukul 10.07 WIB.

¹¹ Audrey Miranti, *Eksploitasi Tenaga Kerja Migran: Studi Kasus Industri Judi Online Serta Eksploitasi di Kamboja*, 2024: 5-6.

¹² Norbertus Oriwardana, "Ketentuan Keimigrasian Terhadap Lalu Lintas Orang Masuk/Keluar Wilayah Indonesia," *Journal of Law and Border Protection*, 2020: 79.

¹³ Andre Crisnaldy, "Literature Review Metodologi Penelitian," 2021: 2.

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

mencakup penilaian terhadap kualitas dan relevansi informasi, serta bagaimana setiap sumber berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai peran imigrasi dalam menangani TOC dibalik bayang-bayang industri judi di Kamboja.

3. Pembahasan

3.1. Penyebab dan Faktor Pendukung Meluasnya TOC

Secara esensial, TOC adalah aktivitas ilegal yang berorientasi pada keuntungan dan dilakukan dengan melintasi batas negara.¹⁴ Perbedaan mendasar antara TOC dengan kejahatan lainnya terletak pada cakupan wilayahnya. TOC dilakukan dengan melintasi batas negara atau bahkan dalam skala global. Industri perjudian merupakan salah satu sektor yang memiliki daya tarik ekonomi besar di berbagai negara, termasuk Kamboja. Sejak beberapa tahun terakhir, Kamboja secara resmi melegalkan dan mengembangkan industri judi, baik kasino fisik maupun judi online, sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan penarik investasi asing. Namun, di balik legalitas dan keuntungan ekonomi tersebut, terdapat bayang-bayang gelap berupa aktivitas kejahatan terorganisir lintas negara/TOC yang memanfaatkan industri judi sebagai kedok untuk menjalankan berbagai tindak pidana, terutama perdagangan orang dan penipuan. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah domestik Kamboja, tetapi juga berdampak pada negara-negara asal pekerja migran, seperti Indonesia, yang menjadi salah satu sumber tenaga kerja ilegal dalam industri judi online di Kamboja. Banyak warga Indonesia yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang karena terjebak dalam jaringan mafia judi online yang beroperasi lintas negara.

Beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya TOC adalah:

- a. Tingginya tingkat kemiskinan global dan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi;
- b. Adanya permintaan akan barang gelap dan jasa ilegal;
- c. Ledakan demografi di negara berkembang;
- d. Perbedaan sistem legislatif dan yuridis antar negara;
- e. Adanya globalisasi terutama pada perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendorong liberalisasi pasar dan pergerakan bebas atas aliran modal.

3.2. Tantangan dan Hambatan Imigrasi dalam Menangani Kasus Kejahatan Terorganisir di Industri Judi Kamboja

- a. Modus Rekrutmen dan Pergerakan Korban yang Sangat Kompleks dan

¹⁴ Rezky Ramadhan, Muh Chaerul Anwar, Muhammad Sajidin, "Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara," *Indonesia Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* vol 5, no. 1, 2023: 17

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

Terorganisir

Kelompok kejahatan terorganisir menggunakan berbagai metode untuk merekrut dan mengirim WNI ke Kamboja secara ilegal.¹⁵ Mereka memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan jaringan agen tidak resmi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik, namun setelah tiba di Kamboja, mereka dipaksa bekerja dalam industri judi online ilegal dan penipuan. Imigrasi menghadapi kesulitan dalam mendeteksi dan menghentikan keberangkatan calon korban karena dokumen perjalanan yang digunakan sering kali legal atau dipalsukan dengan sangat rapi. Selain itu, jaringan mafia ini juga menggunakan berbagai jalur keberangkatan, termasuk jalur resmi yang dimanipulasi, sehingga pengawasan menjadi sangat rumit.

b. Status Pekerja Migran Ilegal yang Rentan dan Minim Perlindungan

Mayoritas WNI yang bekerja di industri judi di Kamboja berstatus ilegal, karena mereka tidak melalui prosedur resmi dan tidak memiliki izin kerja yang sah. Status ini membuat mereka sulit dilindungi oleh hukum, baik di Indonesia maupun di Kamboja. Imigrasi menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi dan melindungi WNI ilegal ini, karena mereka sering tidak terdaftar dalam sistem resmi dan sulit dihubungi. Ketika terjadi pelanggaran atau eksploitasi, korban juga takut melapor karena khawatir akan ditangkap dan dideportasi.

c. Perbedaan Sistem Hukum dan Kelemahan Penegakan di Negara Tujuan

Salah satu hambatan utama adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Kamboja, serta kelemahan dalam penegakan hukum di Kamboja. Banyak kasus perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran tidak ditindaklanjuti secara serius karena adanya praktik korupsi dan kolusi aparat lokal dengan pelaku kejahatan. Hal ini menyulitkan Imigrasi Indonesia dan aparat penegak hukum untuk melakukan kerja sama efektif dalam menangani kasus, termasuk proses pemulangan korban dan penindakan pelaku.

d. Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya Imigrasi

Petugas imigrasi di Indonesia dan Kamboja memiliki keterbatasan dalam hal jumlah personel, teknologi pendukung, dan pelatihan khusus untuk mendeteksi perdagangan orang dan modus kejahatan terorganisir. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap calon pekerja migran dan pemantauan di perbatasan menjadi kurang optimal. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi terkait di dalam negeri juga mempersempit ruang gerak Imigrasi dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

¹⁵ Evi Masrifatin Silvia, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir," *Journal Inicio Legis*, vol. 1, no. 1, 2020: 3.

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

e. Penggunaan Dokumen Palsu dan Identitas Ganda

Pelaku kejahatan sering memanfaatkan dokumen perjalanan palsu atau identitas ganda untuk memudahkan pergerakan korban secara ilegal. Dokumen yang dipalsukan sangat sulit dideteksi oleh petugas imigrasi tanpa alat verifikasi canggih dan kerja sama internasional yang kuat. Fakta ini menjadi hambatan besar dalam mencegah keberangkatan WNI yang rentan menjadi korban perdagangan orang.

f. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Banyak WNI yang tidak memahami risiko bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi, termasuk bahaya terjebak dalam industri judi ilegal dan perdagangan orang. Kurangnya edukasi dan sosialisasi membuat mereka mudah terpengaruh oleh tawaran pekerjaan ilegal yang menjanjikan penghasilan besar. Imigrasi dan instansi terkait menghadapi tantangan dalam menjangkau dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.

g. Hambatan Koordinasi dan Pertukaran Informasi Antarnegara

Meskipun sudah ada kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, koordinasi dan pertukaran informasi masih sering terkendala oleh perbedaan prosedur, birokrasi, dan keterbatasan teknologi. Hambatan ini memperlambat respons aparat dalam menangani kasus perdagangan orang dan pemulangan korban.

3.3 Upaya Menanggulangi TOC Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

a. Kerja Sama Bilateral antara Indonesia dan Kamboja

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam bidang keimigrasian dan penanggulangan kejahatan transnasional menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di kawasan Asia Tenggara. Melalui mekanisme diplomasi dan nota kesepahaman (MoU), kedua negara membangun kolaborasi strategis yang mencakup pertukaran data intelijen migrasi, pengaturan jalur mobilitas manusia yang legal dan aman, serta identifikasi dan verifikasi status kewarganegaraan migran yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana lintas negara.

Kerja sama ini juga meliputi penanganan bersama kasus pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen perjalanan, termasuk pemalsuan paspor dan visa, yang sering dimanfaatkan oleh jaringan sindikat internasional. Forum bilateral, seperti *Joint Task Force on Migrant Protection* dan pertemuan teknis antarpejabat imigrasi, telah diselenggarakan secara berkala guna memperkuat koordinasi lintas yurisdiksi, mempercepat proses repatriasi WNI korban eksploitasi, serta mendorong penegakan hukum bersama terhadap pelaku utama di kedua negara. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan antara Direktorat Jenderal Imigrasi

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Kamboja dan lembaga penegak hukum setempat untuk menjamin perlindungan hukum dan kemanusiaan terhadap WNI yang terjebak dalam praktik eksploitasi tenaga kerja, khususnya di industri perjudian daring ilegal yang marak di wilayah Sihanoukville dan Phnom Penh.

b. Pencegahan Melalui Edukasi dan Sosialisasi

Pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu pilar utama dalam strategi nasional untuk memberantas perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Pemerintah Indonesia secara aktif mengedukasi masyarakat, khususnya di daerah-daerah kantong migran seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, agar calon pekerja migran memahami pentingnya mengikuti jalur penempatan resmi serta menyadari risiko yang melekat dalam praktik perekrutan ilegal. Edukasi ini dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain kampanye publik berbasis komunitas, penyuluhan hukum di desa-desa, pelatihan keterampilan kerja sebelum keberangkatan (*Pre-Departure Orientation*), dan penyebaran materi informasi melalui media cetak, digital, serta media sosial. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan organisasi masyarakat sipil, juga melaksanakan program Desa Migran Produktif (*Desmigratif*) yang bertujuan membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi godaan perekrutan ilegal. Upaya ini diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perangkat desa untuk membentuk jaringan perlindungan di tingkat lokal.

c. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Penguatan regulasi dan penegakan hukum merupakan langkah strategis yang diambil baik oleh pemerintah Kamboja maupun Indonesia dalam merespons maraknya praktik perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja lintas negara. Di Kamboja, pengesahan *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* pada tahun 2008 menjadi landasan hukum utama dalam memerangi perdagangan manusia, khususnya yang berkedok industri hiburan dan perjudian daring. Undang-undang ini mengatur sanksi tegas terhadap pelaku, mekanisme perlindungan korban, serta memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan kejahatan terorganisir.

Di sisi lain, Indonesia melakukan penguatan regulasi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang menggantikan UU No. 39 Tahun 2004. UU ini menekankan prinsip perlindungan menyeluruh sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri, serta memperketat mekanisme perizinan dan pengawasan

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)¹⁶. Pemerintah juga mengembangkan sistem informasi terpadu seperti Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) yang dikelola oleh Kementerian P2MI, guna meminimalisir perekrutan ilegal dan memperkuat transparansi. Penegakan hukum terhadap agen perekrutan ilegal dan sindikat perdagangan orang turut melibatkan kerja sama antarnegara, termasuk melalui pertukaran data intelijen, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum kedua negara.

d. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Imigrasi

Pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi petugas imigrasi serta aparat penegak hukum lainnya diselenggarakan sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang dan penyalahgunaan dokumen perjalanan. Program pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai modus operandi sindikat kriminal, teknik investigasi forensik dokumen, penggunaan teknologi biometrik, hingga kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa para petugas memiliki kompetensi yang memadai dalam mengidentifikasi indikasi eksploitasi, menyaring pelaku dan korban potensial, serta menerapkan tindakan hukum sesuai standar hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Pengembangan Mekanisme Pencegahan Khusus Indonesia mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus dengan Kamboja untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang, termasuk pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja dan jalur keberangkatan ilegal.

e. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional dan Lembaga Non-Pemerintah

Kolaborasi dengan organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah menjadi elemen krusial dalam memperkuat upaya penanggulangan kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan migran. Dukungan dari organisasi seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* diwujudkan melalui penyediaan pelatihan teknis, pengembangan modul pendidikan, penguatan kapasitas institusi, serta fasilitasi kerja sama regional dan global. Selain itu, lembaga non-pemerintah turut berperan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan, pemulihan dan reintegrasi korban, serta pengawasan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Misalnya, IOM secara rutin mengadakan pelatihan identifikasi korban perdagangan orang bagi petugas

¹⁶ Azaria Yasmine, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal," *Jurist-Diction* vol.2, no. 5, 2019: 1595.

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

imigrasi di perbatasan, sementara UNODC mendukung pengembangan kerangka hukum nasional sesuai dengan Protokol Palermo. Kolaborasi ini memastikan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif.

4. Kesimpulan

Keberadaan Transnational Organized Crime (TOC) yang memanfaatkan industri judi daring di Kamboja telah menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia, terutama mereka yang direkrut melalui jalur ilegal. Dari sudut pandang keimigrasian, peran strategis Ditjen Imigrasi menjadi sangat penting dalam mencegah perekrutan dan keberangkatan WNI secara tidak sah melalui penguatan kontrol dokumen, kerja sama bilateral, serta peningkatan kapasitas petugas. Di samping itu, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan edukasi masyarakat, penguatan sistem hukum, serta kolaborasi dengan organisasi internasional guna menjawab tantangan lintas negara yang kompleks. Kesuksesan perlindungan WNI dari TOC sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat untuk menghindari jalur migrasi non-prosedural. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan preventif dan represif yang lebih adaptif serta komitmen kuat dari pemerintah Indonesia dan negara mitra untuk menghentikan eksploitasi lintas batas ini.

5. Referensi

Buku

Nurul Azizah Zayda, Agus Haryanto, dan Arief Bakhtiar Darmawan (2021). *Tindak Pidana Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Oceania Press.

Ahmadi Heri Purwono (2014). *Peningkatan Stabilitas Keamanan Maritim ASEAN guna Mencegah Tindak Kejahatan Lintas Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional*.

Jurnal :

Anishah Wulandari, Devita Maulida Soleha, and Rechal Wulandari. (2023). *Analisis Dmpak Globalisasi Pada Perdagangan Internasional*. J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) 8, no.1.

Azaria Yasmine. *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal*. Jurist-Diction vol.2, no. 5, 2019.

Evi Masrifatin Silvia. *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Journal Inicio Legis, vol. 1, no. 1.

Heti Friskatat (2024). *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*

Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian

sebagai Kejahatan Terorganisasi Internasional. Jurnal Kajian Konstitusi vol. 4 no. 1.

Jazuli A (2016). Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (*Development of defence and security for law enforcement in Indonesia: a state authority*). Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Norbertus Oriwardana (2020). Ketentuan Keimigrasian Terhadap Lalu Lintas Orang Masuk/Keluar Wilayah Indonesia," Journal of Law and Border Protection.

Nursanto G (2019). Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Perspektif Konvensi Internasional (*IMOFAL CONVENTION*)," Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian.

Rezky Ramadhan, Muh Chaerul Anwar, Muhammad Sajidin (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) vol 5, no. 1.

Artikel :

Audrey Miranti (2024). *Eksplorasi Tenaga Kerja Migran: Studi Kasus Industri Judi Online Serta Eksplorasi di Kamboja*.

Andre Crisnaldy (2021). *Literature Review Metodologi Penelitian*.

Website :

<https://www.cna.id/indonesia/kisah-kelam-perdagangan-manusia-di-balik-industri-judi-online-di-kamboja-26426>, (diakses tanggal 26 April 2025)

<https://nasional.kompas.com/read/2025/04/24/21392471/angka-wni-bermasalah-di-kamboja-naik-174-persen-1301-kasus-dalam-3-bulan>, (diakses tanggal 26 April 2025).

<https://planet.merdeka.com/hot-news/1301-wni-terjerat-masalah-di-kamboja-penipuan-daring-melonjak-263-persen-386006-mvk.html?page=3>, (diakses tanggal 26 April 2025).

www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--SR48R63.pdf. (diakses tanggal 27 April 2025).